

**PERAN KOMISI B DPRD KOTA SURABAYA DALAM PENGAWASAN KINERJA
PDTS KEBUN BINATANG SURABAYA MELALUI PEMBENTUKAN PANTIA
KHUSUS (PANSUS KBS)**

Priyanka Ruweyna W.¹, Ghulam Maulana Ilman²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(email: ruweynawirawan@gmail.com)
(email: ghulamilman@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Program magang merupakan kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk memahami penerapan teori administrasi publik dalam lingkungan kerja pemerintahan. Tujuan kegiatan magang ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang administrasi publik, khususnya pada fungsi pengawasan legislatif di DPRD Kota Surabaya. Kegiatan dilaksanakan di Komisi B dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya selama 40 hari kerja, menggunakan metode *observational participation* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi kegiatan. Praktikan berpartisipasi dalam kegiatan administratif seperti pengarsipan, penyusunan laporan, dokumentasi rapat, serta asistensi dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami proses kerja lembaga legislatif, meningkatkan keterampilan komunikasi birokratis, kedisiplinan, serta etika kerja di lingkungan pemerintahan. Selain itu, magang ini memberikan pemahaman konkret tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini dapat disimpulkan telah berhasil memberikan manfaat akademik dan praktis bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja profesional di sektor publik.

Kata kunci: Magang, DPRD Kota Surabaya, Pengawasan legislatif, Administrasi publik, Etika kerja

ABSTRACT

The internship program is an academic activity designed to provide students with practical experience in applying public administration theories within a governmental work environment. The purpose of this internship is to enhance students' competencies in public administration, particularly in the legislative oversight function of the Surabaya City Regional House of Representatives (DPRD). The program was conducted in Commission B and the Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faction of the DPRD Surabaya for 40 working days, using an observational participation approach with data collection techniques including observation, informal interviews, and documentation. The intern participated in various administrative tasks such as archiving, report preparation, meeting documentation, and assistance in legislative and supervisory functions. The results show that students gained a deep understanding of legislative work processes, improved their bureaucratic communication skills, discipline, and professional ethics in a governmental setting. Furthermore, the internship provided a concrete understanding of the implementation of transparency and public accountability principles in local governance. In conclusion, this internship successfully offered both academic and practical benefits in preparing students for professional careers in the public sector.

Keywords: Internship, Surabaya City DPRD, Legislative oversight, Public administration, Work ethics

PENDAHULUAN

Program magang merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja profesional. Melalui kegiatan magang, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama

perkuliahan ke dalam praktik nyata, sekaligus mengembangkan keterampilan teknis, komunikasi, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang dinamis. Dalam konteks pendidikan tinggi di era globalisasi dan digitalisasi, dunia kerja menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional dan karakter tangguh seperti disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif (Sugiyono, 2022). Oleh karena itu, pelaksanaan magang menjadi jembatan penting antara dunia akademik dan dunia profesional, terutama dalam bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan.

Secara nasional, lembaga legislatif daerah memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah dengan tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran (Wibowo, 2021). Melalui fungsi pengawasan, DPRD bertanggung jawab memastikan agar kebijakan pemerintah daerah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (KemenPAN-RB, 2022). Dalam konteks inilah, kegiatan magang di lingkungan DPRD memiliki relevansi tinggi karena memberikan pemahaman empiris kepada mahasiswa tentang dinamika proses politik, administrasi publik, serta mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal.

Secara lokal, DPRD Kota Surabaya merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah kota, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satu BUMD yang menjadi perhatian publik pada tahun 2025 adalah Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTs) Kebun Binatang Surabaya (KBS). KBS merupakan aset strategis kota yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai lembaga konservasi, pendidikan, dan penelitian satwa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KBS menghadapi berbagai persoalan manajerial seperti penurunan jumlah pengunjung, kerugian keuangan, dan proyek investasi yang tidak efisien seperti pembangunan *tunnel* senilai Rp34 miliar yang dinilai tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik (DPRD Kota Surabaya, 2025).

Sebagai respon terhadap berbagai persoalan tersebut, DPRD Kota Surabaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada tahun 2025. Pembentukan Pansus ini dipelopori oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya, yang membidangi perekonomian dan pengawasan terhadap kinerja BUMD. Komisi B memiliki fungsi strategis dalam memastikan pengelolaan KBS berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Melalui Pansus KBS, DPRD berupaya melakukan investigasi, mengevaluasi kinerja PDTs, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif agar pengelolaan aset daerah ini dapat kembali optimal dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Surabaya (Pemkot Surabaya, 2023).

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Surabaya, khususnya di bawah koordinasi Komisi B dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan legislatif terhadap BUMD, memahami

mekanisme kerja komisi, serta mempelajari interaksi antara legislatif, eksekutif, dan publik. Melalui keterlibatan dalam proses administrasi, dokumentasi rapat, serta pendampingan kegiatan kelembagaan, mahasiswa dapat memahami bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsi kontrol dan advokasi terhadap kebijakan publik secara nyata.

Dengan demikian, pelaksanaan magang di DPRD Kota Surabaya memiliki nilai strategis, baik secara akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, kegiatan ini memperkaya wawasan mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan daerah, fungsi legislatif, dan dinamika politik lokal. Dari sisi praktis, pengalaman ini melatih mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja birokrasi, memahami mekanisme pengawasan publik, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menilai efektivitas kebijakan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan magang di Komisi B DPRD Kota Surabaya tidak hanya menjadi pengalaman profesional, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi akademik dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan magang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, khususnya pada Komisi B dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menggunakan pendekatan pengabdian dalam bentuk *observational participation*. Melalui pendekatan ini, praktikan terlibat secara langsung dalam kegiatan kerja lembaga legislatif untuk memahami sistem administrasi pemerintahan daerah serta proses politik dan pelayanan publik yang dijalankan oleh DPRD. Jenis kegiatan magang ini bersifat partisipatif-edukatif, di mana praktikan tidak hanya mengamati aktivitas kerja, tetapi juga turut berkontribusi dalam kegiatan staf seperti pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, dokumentasi rapat, serta asistensi administratif yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan.

Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, yaitu sejak 4 Agustus hingga 10 Oktober 2025, bertempat di Sekretariat DPRD Kota Surabaya, tepatnya di Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 18–22, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan mengikuti jam kerja instansi, yaitu Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB dan Jumat pukul 07.00–16.30 WIB.

Selama pelaksanaan magang, praktikan mengikuti berbagai kegiatan yang mencakup observasi langsung terhadap aktivitas lembaga, asistensi administrasi, serta pendampingan dalam kegiatan kelembagaan DPRD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara informal dengan staf fraksi untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai proses kerja, dinamika organisasi, dan pelaksanaan kebijakan publik. Praktikan juga secara rutin mencatat hasil kegiatan ke dalam jurnal logbook harian sebagai bentuk dokumentasi proses belajar dan refleksi atas pengalaman kerja selama magang.

Analisis data dalam laporan ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan hasil pengamatan dan pengalaman kerja menjadi narasi yang sistematis dan logis. Data yang

diperoleh melalui observasi dan dokumentasi diolah untuk menggambarkan keterlibatan praktikan dalam kegiatan kelembagaan serta kontribusi yang diberikan selama magang. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel aktivitas mingguan untuk mempermudah pembaca memahami proses pelaksanaan magang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, praktikan juga menyusun laporan akhir magang dan video luaran kegiatan yang berisi dokumentasi aktivitas selama pelaksanaan magang. Keduanya menjadi bukti nyata keterlibatan praktikan dalam lingkungan kerja pemerintahan serta sarana refleksi terhadap kompetensi yang telah dikembangkan selama kegiatan berlangsung.

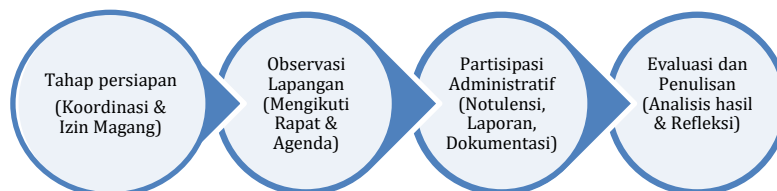
Gambaran umum tahapan kegiatan magang disajikan dalam Gambar 1, yang menunjukkan alur kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan akhir dan luaran magang.

Gambar 1. Bagan Alir Kegiatan Magang

HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pengalaman empiris yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang mekanisme kerja legislatif di tingkat daerah. Evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan magang ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi akademik, profesional, dan etika kerja mahasiswa, serta bagaimana kegiatan ini mendukung efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya.

Secara umum, hasil yang dicapai selama magang menunjukkan bahwa praktikan berhasil



memahami secara mendalam bagaimana DPRD menjalankan fungsi legislasinya, terutama dalam proses pengawasan terhadap lembaga daerah seperti PDTs Kebun Binatang Surabaya. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan rapat, observasi, serta asistensi administratif, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengenal lebih dekat proses pengambilan keputusan politik, mekanisme koordinasi antarfraksi, hingga pola komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pengalaman ini memperlihatkan secara konkret bagaimana konsep governance by oversight dijalankan dalam konteks pemerintahan daerah. Selain itu, kegiatan magang juga melatih keterampilan teknis mahasiswa, seperti penyusunan surat resmi, pembuatan notula rapat, pengarsipan dokumen, serta pengelolaan administrasi digital melalui sistem Srikandi. Semua hal tersebut memperkaya kompetensi praktikan dalam bidang tata kelola administrasi pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Namun demikian, dalam proses pelaksanaan magang juga terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap dokumen dan informasi yang bersifat rahasia atau internal lembaga. Hal ini menuntut praktikan untuk menjaga etika profesional dengan tetap menghormati kerahasiaan lembaga serta menggunakan pendekatan observasional yang selektif. Selain itu, jadwal kegiatan legislatif yang kerap berubah secara dinamis menuntut mahasiswa untuk beradaptasi dengan cepat dan memiliki manajemen waktu yang baik. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang intensif dengan pembimbing lapangan dan staf fraksi. Mahasiswa juga berinisiatif memperdalam literatur dan regulasi terkait tugas dan fungsi DPRD agar dapat memahami konteks kebijakan secara lebih komprehensif.

Dari sisi akademik, kegiatan magang memiliki relevansi kuat dengan teori-teori yang dipelajari dalam perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan administrasi publik, kebijakan publik, serta prinsip-prinsip *good governance*. Fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi yang dijalankan oleh DPRD Kota Surabaya merupakan manifestasi nyata dari teori tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Melalui pengalaman empiris ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai implementasi kebijakan, tetapi juga memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi publik sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat. Kasus pengawasan terhadap PDTs Kebun Binatang Surabaya melalui pembentukan Pansus menjadi contoh konkret bagaimana lembaga legislatif berperan dalam memastikan efektivitas kebijakan publik.

Selain memperkuat kapasitas akademik, kegiatan magang juga memberikan pembelajaran berharga dalam aspek profesionalitas dan etika kerja. Mahasiswa belajar untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai struktur hierarki organisasi. Dalam interaksi sehari-hari dengan anggota dewan, staf sekretariat, maupun masyarakat, praktikan dituntut untuk menjaga sikap sopan, objektif, dan profesional. Pengalaman ini menjadi bekal penting dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, terutama di sektor pemerintahan dan kebijakan publik yang menuntut integritas dan kepekaan terhadap nilai-nilai pelayanan publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan magang di Komisi B DPRD Kota Surabaya memberikan pengalaman komprehensif mengenai dinamika politik lokal, praktik pengawasan legislatif, serta pentingnya peran administrasi dalam menunjang kinerja lembaga perwakilan rakyat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori-teori yang selama ini dipelajari di ruang kuliah, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme, kolaborasi, dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, magang ini menjadi proses pembelajaran integral yang membentuk mahasiswa sebagai calon aparatur dan ilmuwan administrasi publik yang kompeten, berintegritas, serta mampu berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.



Gambar 2. Kegiatan Magang Mengikuti Kegiatan Rapat Pansus KBS

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang di Komisi B dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami dinamika kelembagaan legislatif di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, praktikan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan terkait pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam hal pengawasan terhadap kinerja lembaga daerah seperti Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTs) Kebun Binatang Surabaya.

Secara umum, pelaksanaan magang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Praktikan mampu mengamati, berpartisipasi, dan beradaptasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari rapat komisi, penyusunan dokumen administratif, hingga pendampingan dalam kegiatan fraksi. Melalui proses tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kerja legislatif, proses pengambilan keputusan politik, serta peran DPRD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Selain itu, magang ini juga memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan kemampuan analitis dan koordinasi lintas sektor. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kebun Binatang Surabaya pada tahun 2025 menjadi contoh konkret bagaimana DPRD melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap lembaga di bawah pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola yang profesional dan transparan. Pengalaman ini membuktikan bahwa teori-teori tentang kebijakan publik dan administrasi pemerintahan yang diperoleh di bangku kuliah memiliki relevansi kuat dalam praktik kelembagaan politik daerah.

Dari sisi pengembangan pribadi, kegiatan magang turut membentuk kemampuan komunikasi, kedisiplinan, serta etika kerja mahasiswa di lingkungan birokrasi. Mahasiswa dilatih untuk memahami tata cara kerja lembaga publik, beradaptasi dengan ritme kerja pemerintahan, dan menjaga profesionalitas dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga memperkuat kesiapan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja, khususnya di bidang pemerintahan dan kebijakan publik.

Dari hasil pelaksanaan magang di Komisi B dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya, dapat disarankan agar kegiatan kelembagaan yang melibatkan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi publik terus ditingkatkan efektivitasnya. DPRD diharapkan memperluas ruang partisipasi publik dalam setiap proses pengawasan, khususnya terhadap lembaga daerah seperti PDTs Kebun Binatang Surabaya, agar transparansi dan akuntabilitas kinerja semakin terjaga.

Selain itu, koordinasi antarbagian dalam lingkungan DPRD perlu terus diperkuat, terutama antara komisi, fraksi, dan sekretariat, guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan pembahasan kebijakan strategis. Proses pembentukan panitia khusus (Pansus) juga diharapkan dapat terus dilakukan secara objektif dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga hasil pengawasan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD juga penting dilakukan secara berkelanjutan agar lembaga legislatif mampu menjalankan peran strategisnya dalam menciptakan kebijakan publik yang progresif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. (2024). *Laporan Kinerja DPRD Kota Surabaya Tahun 2024*. Surabaya: Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. (2025). *Notulen Rapat Panitia Khusus (Pansus) Kebun Binatang Surabaya Tahun 2025*. Surabaya: Arsip Internal DPRD Kota Surabaya.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Panduan Umum Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)*. Jakarta: KemenPAN-RB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang *Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Profil Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTs) Kebun Binatang Surabaya*. Surabaya: Bagian Humas Pemkot Surabaya.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Administrasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, A., & Winarno, B. (2020). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik dalam Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibowo, D. (2021). *DPRD dan Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.